

Hasil Tender Dapat Sisa Dana Rp 24 Miliar

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng berhasil menghimpun dana sebesar Rp 24 miliar dari hasil tender kegiatan fisik. Dana itu diklaim sebagai efisiensi hasil tender atas proyek-proyek dengan skala besar.

Tercatat selama tahun 2017 lalu, ada 120 paket kegiatan yang ditenderkan melalui sistem Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dari 120 proyek itu, hanya empat kegiatan yang gagal tender karena waktu yang mepet. Sisanya sebanyak 116 kegiatan berhasil ditenderkan dengan pagu anggaran sebesar Rp 165,42 miliar.

Dalam proses tender, pihak rekanan menawar lebih rendah dari pagu anggaran atas sejumlah proyek. Sehingga total anggaran yang dibayarkan hanya mencapai Rp 141,02 miliar. Artinya ada efisiensi dari hasil tender sebesar Rp 24,3 miliar. "Ini hanya efisiensi dari hasil tender saja. Itu totalnya Rp 24,3 miliar," kata Kabag Layanan Pengadaan Setda Buleleng, Made Budi Setiawan, Rabu (3/1).

Dijelaskan, efisiensi sebesar Rp 24,3 miliar itu diperoleh atas kegiatan yang berskala besar, seperti paket peningkatan kualitas jalan. Di antaranya disebutkan, perbaikan jalan Paket VI, yang meliputi Bukti-Bulian dan Pacung-Banjar Tonggak dengan pagu anggaran sebesar Rp 7,15 miliar, ditawar senilai



Nyoman Swatantra

Rp 5,68 miliar. Sehingga terdapat sisa anggaran Rp 1,46 miliar. Kemudian ada lagi paket 1, jalan Tambakan-Pakistan, Tambakan- Dusung Padang Lumbang dengan pagu anggaran Rp 8 miliar, hasil penawaran dapat dihemat sebesar Rp 808,9 juta.

Meski nilai efisiensi cukup besar, ternyata tak semua sisa anggaran bisa kembali ke kas daerah untuk dimanfaatkan kembali. Masalahnya ada sisa anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang tidak bisa dimanfaatkan, karena perubahan regulasi. "Misalnya proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK), itu kan tidak bisa kembali ke kas daerah. Tapi secara umum, nilai efisiensinya Rp 24 miliar lebih," ujar Kabag Layanan Pengadaan, Budi Setiawan.

Sedangkan empat proyek

yang gagal ditenderkan itu masing-masing, penyusunan detail engineering design konstruksi gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng senilai Rp 108 juta, kemudian belanja jasa konsultan penyusunan data potensi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng senilai Rp 250 juta. Dua proyek ini gagal tender karena tidak cukup waktu untuk dilanjutkan.

Kemudian proyek konstruksi di Rumah Sakit Pratama di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt senilai Rp 3 miliar. Proyek ini meliputi penataan landscap dan pembuatan tembok pagar. Namun karena waktu terlalu mepet, akhirnya tidak ada rekanan yang bersedia mengajukan penawaran. Di samping itu rekanan yang punya keahlian khusus dibidang landscap juga tidak ada.

Satu proyek lainnya adalah belanja jasa konsultasi penilai pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buleleng. Proyek senilai Rp 175 juta itu disebut untuk membayar jasa appraisal dalam proses pembebasan lahan pembangunan shortcut Singaraja-Denpasar. Namun karena gambar rancang bangun shortcut belum terbit, akhirnya pengadaan lahan terpaksa ditunda. **k19**

Edisi : Senin, 4 Januari 2017

Hal : 4

Kisruh Pengadaan Seragam di SMPN 2 Sawan

Eks Pengurus Komite Bongkar *Mark up* Harga

SINGARAJA, NusaBali

Sempat reda, kisruh pengadaan pakaian seragam Pramuka di SMPN 2 Sawan kembali bergulir. Kali ini, mencuatnya kisruh itu dugaan akibat pembagian fee yang tidak merata.

Konon dalam pengadaan pakaian seragam siswa tahun ajaran 2017/2018, terjadi mark up harga. Semula harga pakaian untuk tiga setel, putih biru, batik, dan Pramuka hanya sebesar Rp 450.000 per siswa. Namun, harga itu di mark up sebesar Rp 150.000, sehingga per siswa dikenakan harga sebesar Rp 600.000.

Dugaan tersebut dibongkar oleh mantan pengurus Komite SMPN 2 Sawan, Kadek Bendesa, yang secara khusus datang ke Radio Guntur, Jalan Gempol Singa-

raja memberikan keterangan pers, Senin (8/1) pagi. Kadek Bendesa, ketika tercatat sebagai pengurus Komite mengungkap kisruh pengadaan seragam Pramuka di SMPN 2 Sawan. Kala itu ia mendampingi para orangtua siswa mempertanyakan keterlambatan pembagian seragam Pramuka kepada siswa kelas 7.

Kali ini Bendesa kembali membongkar dugaan bagi-bagi fee dengan jalan menaikkan harga seragam. Menurut Bendesa, hasil mark up harga itu terkumpul sekitar Rp 15 juta, dengan jumlah siswa kala itu diperkirakan sebanyak 300 orang. Uang yang terkumpul akibat dugaan mark up harga itu kemudian dibagi, dimana komite sekolah kabarnya kebagian Rp 7 juta. Sisanya diduga

mengalir ke sejumlah pihak di lingkungan sekolah. "Saya sempat tanyakan sisa fee itu, katanya dibagikan kepada para guru dan pegawai di sekolah," ungkapnya.

Nah, uang yang mengalir ke Komite ini diduga kuat menjadi pemicu mencuatnya kisruh pengadaan seragam. Konon karena jatah Komite tersebut tidak dibagi merata pada anggota Komite. Kadek Bendesa mengaku mendapat jatah pembagian fee atas mark up harga seragam tersebut sebesar Rp 2 juta. "Fee ke Komite Rp 7 juta, saya diberikan uang dua juta, sisanya lagi yang tujuh juta, masih dibawa oleh Pak Suterisna (salah satu guru,red)," beber Bendesa.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komite SMPN 2 Sawan, Gede Maharjaya membantah tuduhan ada



KADEK Bendesa saat memberi keterangan pers, Senin (8/1).

bagi-bagi fee dengan cara mark up harga seragam. Dikatakan, dalam pengadaan seragam tersebut, orangtua siswa yang berhubungan langsung dengan pihak konveksi. Se-

hingga masalah harga berdasar kesepakatan pihak orangtua siswa dengan pihak konveksi. "Sepengertian saya, orangtua siswa yang langsung berhubungan dengan

konveksi. Tidak ada mark up harga di situ," katanya.

Maharjaya mengakui ada sumbangan dari pihak konveksi atas pengadaan seragam tersebut. Namun, ia mengaku tidak tahu nilai dari sumbangan tersebut.

"Kalau ada sumbangan saya tahu informasinya itu, tetapi besarnya saya tidak tahu. Saya setuju ada sumbangan itu, karena untuk pembuatan Pos Satpam, jadi saya setuju karena untuk kepentingan sekolah," terangnya.

Sementara Ketut Sutrisna yang dikonfirmasi pertelepon mengakui menerima dana sebesar Rp 7 juta dari pihak konveksi. Dana yang diterimanya itu adalah sumbangan dari pihak konveksi untuk rehab Pos Satpam. "Dari pihak konveksi mem-

berikan dana katanya dana itu sumbangan, karena memang ada rehab Pos Satpam. Tetapi Pak Bendesa itu yang ngotot minta dana dua juta. Jadi karena ngotot saya berikan, sehingga rehab Pos Satpam dari dana lima juta itu," terangnya.

Kisruh pengadaan seragam di SMPN 2 Sawan ini mencuat pada November 2017 lalu. Kala itu sejumlah orangtua mempertanyakan seragam Pramuka, karena anak mereka belum menerima jatah setelan Pramuka. Para orangtua ini mengaku telah melunasi biaya pengadaan seragam tersebut. Kisruh itu pun ditangani oleh Pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng, hingga akhirnya kisruh itu reda. **k19**

Dua Pasar Tradisional Diusulkan Direvitalisasi

MANGUPURA, NusaBali

Pasar Tente yang ada di depan kawasan Pura Taman Ayun, Kecamatan Mengwi, diusulkan untuk direvitalisasi. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Badung sudah menyiapkan kajian agar bisa dieksekusi pada 2018. Selain itu, Pasar Kuta I juga jadi salah satu prioritas, karena feasibility study (FS) disebut sudah rampung.

"Tahun 2018 ini yang kami usulkan Pasar Kuta I dan Pasar Tente untuk revitalisasi. Tapi karena kami selaku user (pengguna), jadi pengerjaan langsung oleh instansi teknis yakni PUPR," kata Direktur Utama PD Pasar Badung Made Sutarma, Rabu (10/1).

Walau begitu, menurutnya, PD Pasar sebatas mengusulkan berdasarkan kajian yang sudah dilakukan. Keputusan apakah bakal dieksekusi tahun 2018 atau tidak, sepenuhnya menjadi keputusan pimpinan. "Jadi kami sebatas mengusulkan saja, keputusannya ada di pimpinan. Namun kajian penataan sudah kami lakukan," kata Sutarma.



PASAR Tente di depan kawasan Pura Taman Ayun, Kecamatan Mengwi, diusulkan direvitalisasi.

Berdasarkan kajian, menurut pria asal Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, itu Pasar Tente akan dibangun bertingkat, sehingga posisinya sejajar dengan jalan. "Kalau sekarang kan posisinya di bawah, kurang strategis. Nah ini yang kami coba usulkan agar bangunan bertingkat,

supaya kelihatan dari jalan. Oh, ada yang jualan minuman, buah-buahan, lebih kelihatan jadinya," tuturnya.

"Memang perlu investasi yang besar. Namun kalau tidak seperti itu rasanya susah pedagang bisa bertahan, sekarang banyak pedagang mengeluh," tandas Sutarma.

Sementara terkait Pasar Kuta I, diakui sejauh ini sudah ada FS-nya. Namun apakah pemerintah bakal mengeksekusi tahun 2018, Sutarma tak bisa memastikan. "Kami cuma sebagai user, eksekusinya langsung dinas PUPR," tukasnya.

Mengenai pengembangan pasar tradisional, PD Pasar masih terus menjajaki beberapa wilayah potensial. Seperti sebelumnya ditegaskan, wilayah potensial yang sedang dijajaki adalah di Canggu, Kecamatan Kuta Utara dan di Munggu, Kecamatan Mengwi. Lahan di Munggu disebut milik provinsi, sedangkan di Munggu adalah lahan pribadi yang bisa dikerjasamakan.

Pada bagian lain, Sutarma menyatakan target pendapatan di 2017 sebesar Rp 18 miliar dapat tercapai. Termasuk program-program 99 persen terealisasi. Menurut dia, pencapaian tersebut akan segera dilaporkan kepada Pemkab Badung, dalam hal ini Bupati Badung. asa

Edisi : Kamis, 11 Januari 2018

Hal : 2

Tahun 2018, 150 RTS Dapat Jatah Bedah Rumah

MANGUPURA, NusaBali

Program bedah rumah berlanjut di 2018. Tahun ini pemerintah menjatah sedikitnya 150 rumah tangga sasaran (RTS) yang dapat bantuan bedah rumah. Untuk program ini disiapkan anggaran Rp 8 milia.

Dari segi jumlah memang ada penurunan ketimbang tahun 2017. Saat itu program bedah rumah menasar sebanyak 625 RTS. Meski begitu, pemerintah berjanji bakal melanjutkan program bedah rumah pada tahun-

tahun mendatang.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Badung AAN Bayu Kumara Putra, Rabu (10/1), menyatakan jumlah bantuan bedah rumah berkurang bila dibandingkan tahun lalu. "Tahun ini hanya 150 RTS saja yang dapat. Tapi sisanya tahun depan akan kami lanjutkan," katanya.

Dengan penambahan 150 unit, berarti sampai akhir 2018 nanti total sudah sebanyak 775 RTS yang mendapat bantuan.

Masih seperti tahun lalu

pula, besaran bantuan untuk masing-masing penerima bedah rumah berbeda. Rinciannya sebagai berikut, rehab total Rp 55 juta, rehab sedang Rp 30 juta, dan peningkatan kualitas rehab ringan Rp 15 juta.

Terkait penurunan jumlah ini, menurutnya karena melihat kemampuan daerah. "Jika kondisi keuangan Badung nanti lebih baik, kemungkinan di perubahan (2018) yang belum mendapat program bedah rumah ini bisa ditambah," katanya.

Sekadar mengingatkan,

berdasarkan hasil pendataan pemerintah jumlah rumah tangga sasaran yang telah diverifikasi tahun 2017 berdasarkan usulan dari desa se-Kabupaten Badung sebanyak 3.315 RTS. Dengan rincian rehab total sebanyak 841 RTS, rehab sedang sebanyak 794 RTS, dan rehab ringan sebanyak 1.190 RTS. Untuk dana bantuan sosial bedah rumah diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening masing-masing penerima bantuan rumah sesuai SK Penetapan oleh Bupati Badung. asa

Edisi : Kamis, 11 Januari 2018

Hal : 2



Terkait Aset Disita Bank

Pemkab Tempuh Jalur Hukum

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng akhirnya menempuh jalur hukum atas munculnya sertifikat hak milik di atas lahan yang diklaim sebagai aset pemerintah yang ada di Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng. Langkah ini guna menyelamatkan aset dengan menggugurkan sertifikat hak milik tersebut lewat Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Saat ini, Pemkab masih susun draf gugatan setelah semua bukti yang dikumpulkan dianggap cukup.

Sertifikat hak milik itu muncul di atas lahan seluas 3,6 are. Lahan itu dulunya dikuasai oleh BKKBN Pemprov Bali. Namun sekitar 1 are dari luas lahan yang ada, justru dikuasai perseorangan dengan bukti sertifikat hak milik. Kini bukti sertifikat hak milik itu justru sudah dijamin kepada sebuah bank.

Ini diketahui setelah lahan seluas 1 are itu disita bank, yang diduga karena kreditur tidak mampu membayar cicilan.

Nah, setelah semua bukti terkumpul Pemkab berencana ajukan gugatan hukum ke PN Singaraja. Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Buleleng Bagus Gede Bharata, Rabu (10/1) mengatakan, bukti-bukti yang sudah terkumpul dianggap sudah cukup kuat sebagai bukti hak kepemilikan atas aset tanah oleh Pemkab.

"Sekarang kami masih mengkaji bersama tim advokasi, mencari celah hukumnya agar gugatannya kuat. Yang pasti Pemkab akan menggugat karena pemerintah tidak ingin aset hilang begitu saja," katanya.

Aset seluas 3,6 are dilu dikuasai BKKBN Provinsi Bali sesuai

sertifikat hak pakai Nomor 4 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2010, lahan itu dihibahkan melalui berita acara serah terima barang oleh sekretaris BKKBN Provinsi Bali I Ketut Adinaya Putra, kepada Kepala KBPP Buleleng saat itu dijabat oleh Gede Komang (Kadisos Buleleng sekarang, red).

Setelah diserahkan, KBPP Buleleng kemudian membangun gedung di atas lahan itu sebagai kantor pusat Penyuluhan Pengendalian Penduduk Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, pada tahun 2011. Kini, oleh Bagian Aset di Badan Keuangan Daerah (BKD), lahan tersebut hendak dibuatkan sertifikat sebagai aset daerah. Ternyata, dalam proses pensertifikatan itu ditemukan ada

sertifikat hak milik di atas lahan tersebut. Sertifikat itu atas nama Ketut Wilaya dengan luas lahan 1 are. Sertifikat itu terbit pada tahun 2002. Namun persoalan tidak berhenti pada munculnya sertifikat atas nama perseorangan di atas lahan pemerintah. Belakangan diketahui juga, jika lahan itu telah dipindahtangankan. Berdasarkan akte jual beli, lahan itu telah pindah tangan pada seseorang yang bernama Made Teguh Wijaya pada tahun 2009.

Celakanya lagi, lahan seluas 1 are itu ternyata sudah disita oleh bank. Diduga sertifikat atas nama perseorangan seluas 1 are itu pernah dijadikan anggunan pinjaman kredit. Lahan tersebut diketahui disita oleh bank karena di atas lahan seluas 1 are itu terpampang banner bertuliskan tanah sitaan. **k19**

Edisi : Kamis 11 Jan 2017

Hal : 4



Penataan Lapangan Puputan dan Pantai Goa Lawah

Dianggarkan Rp 9,8 Miliar

Semarapura (Bali Post) -

Penataan ruang publik kembali digulirkan Pemkab Klungkung tahun ini. Sesuai perencanaan, akan menyasar Lapangan Puputan Klungkung dan Pantai Goa Lawah, Desa Pesiinggahan Kecamatan Dawan. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 9,8 miliar.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Rabu (10/1) kemarin menjelaskan, penataan Lapangan Puputan yang selama ini dijadikan masyarakat sebagai tempat berolahraga maupun aktivitas lainnya menjadi skala prioritas. Bahkan, perencanaannya sudah rampung tersusun. Anggaran yang disiapkan tak tanggung-tanggung.

Untuk penataan taman maupun pengadaan pendukung lain, seperti *trekking* dan tempat duduk mencapai Rp 2,3 miliar. Di lokasi ini juga direncanakan ada pembangunan patung Ida Dewa Agung Jambe yang dianggarkan Rp 4 miliar. "Taman bermain juga ada untuk anak-anak, dewasa dan lansia. Wifi ditambah. Seluruhnya akan ditata. Total anggaran Rp 6,3 miliar," tegasnya.

Bupati asal Nusa Ceningan ini menyatakan lapangan tersebut juga sekaligus menjadi Bencingah Puri Agung Klungkung sebagai tempat



Bali Post/sos

PENATAAN - Lapangan Puputan Klungkung. Tahun ini Pemkab berencana melakukan penataan dengan anggaran miliaran rupiah. Hal serupa juga akan dilakukan pada Pantai Goa Lawah.

raja bersama keluarga untuk melihat suasana perkotaan. "Ini wujud apresiasi saya kepada tokoh puri beserta keluarga. Cara menempatkan beliau banyak. Termasuk *city tour* yang juga bisa ke puri," ungkapnya.

Disampaikan lebih lanjut, dengan ruang publik yang tertata, diharapkan masyarakat bisa menghabiskan waktu berlibur di tengah kota. Tidak harus keluar menuju daerah lain. Selain itu, tingkat kebahagiaannya dapat meningkat karena telah mendapatkan tempat yang nyaman dan

layak. "Dengan situasi seperti sekarang, banyak yang jalan-jalan di lapangan. Harapan saya dengan penataan, masyarakat tidak jauh-jauh lancong. Nikmati saja yang ada di sini," ucapnya.

Sementara itu, untuk penataan Pantai Goa Lawah, dianggarkan Rp 3,5 miliar. Objek wisata ini nantinya akan diintegrasikan dengan pertanian garam yang juga dibangkitkan Pemkab. "Setelah jadi akan dikelola desa," imbuhnya.

Perbekel Pesiinggahan Nyoman Suastika sempat menyatakan kondisi pantai masih

terkesan kumuh. Adanya rencana penataan oleh Pemkab dinilai sebagai langkah strategis. "Sekarang kunjungan saat hari libur cukup ramai. Tetapi pantai masih kumuh. Kalau ada rencana penataan, kami sangat mendukung," ujarnya.

Selain itu, penataan ini juga untuk mendukung status Desa Pesiinggahan sebagai desa wisata. Ke depan, langkah serupa juga diharapkan dapat dilakukan pada Bukit Tengah yang lokasinya berdekatan. "Kami berharap penataan ini juga bisa dilakukan," pungkasnya. (kmb45)

Edisi : kamis, 11 Januari 2017

Hal : _____

Rumah Jabatan Bupati Badung Segera Dipelaspas

Mirip Istana, Habiskan Dana Rp 23 M



TRIBUN BALI/MADE PRASETTIA ARYAWAN

RUMAH BUPATI - Dua warga melintas di depan proyek rumah jabatan Bupati Badung di Komplek Puspem Badung, Sempidi, Mengwi, Badung, Sabtu (13/1). Rumah itu akan dipelaspas, Selasa (16/1).

Puluhan pekerja dan sejumlah alat berat proyek pembangunan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Badung di areal Puspem Badung terus beroperasi.

PARA pekerja itu terus dikebut untuk menyelesaikan proyek bangunan megah tersebut. Namun demikian, sesuai kontrak kerja, bangunan ini sudah ngaret 17 hari.

Menurut informasi, bangunan megah menyerupai istana yang menggelontorkan

anggaran Rp 23,4 miliar ini akan dilakukan upacara *pemelaspasan* (penyucian bangunan), Selasa (16/1) mendatang.

"Iya hari Selasa (16/1) akan dilakukan upacara *melaspas*."

Hanya saja belum serah terima bangunan seluruhnya. Sephari sebelum upacara *melaspas* akan dilakukan serah

BERSAMBUNG ➤ HAL 7

Edisi : Minggu 14 Januari 2018

Hal : 7

Mirip Istana, Habiskan..

terima bangunan," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, IB Surya Suamba saat dihubungi, Sabtu (13/1).

Dia mengakui, secara keseluruhan pengerjaan rumah jabatan ini memang *ngaret* (dari target awal yakni akhir Desember 2017. Akibatnya, PUPR Badung melakukan kebijakan yakni mewajibkan kontraktor bangunan tersebut membayar denda Rp 60 juta

per hari.

"Karena pengerjaannya ngaret, kami minta kontraktor membayar denda Rp 60 juta per harinya," sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badung (PUPR) Badung, I Gusti Ayu Arinda Trisnawati mengatakan, pembangunan proyek megah ini terus dikerjakan. Pada akhir 2017 proyek semestinya

sudah rampung.

Dia menjelaskan, nuansa bangunan dirancang secara tradisional Bali atau bentuk bangunan yang Tri Angga. Hal tersebut dimaksud seperti penggunaan material yang menggunakan paras dan bata, bentuk tembok *penyengker* atau pembatas dibangun dengan *style* Bali dengan pintu masuk yang menggunakan Kory. Sementara untuk atap mengguna-

kan atap limasan.

"Untuk nuansa bangunannya tetap akan menggunakan konsep Tri Angga. Dan untuk pola pembagiannya tetap menggunakan konsep Tri Mandala," jelasnya.

Untuk luas bangunannya, kata dia, rumah jabatan bupati seluas 1.339 meter², sementara untuk Rumjab Wakil Bupati seluas 1.303 meter². Sementara untuk keseluruhan bahwa luas rumah jabatan

dengan semua bangunan penunjangnya ini adalah 1,8 hektare dengan rincian rumah jabatan Bupati sekitar 1 hektare dan Wakil Bupati sekitar 80 are.

"Bangunan penunjangnya seperti tempat suci, pendopo, ruang pertemuan, pos jaga, dan garasi," sebutnya.

Dia menjelaskan, pada utamaning mandala sebagai tempat persembangan berupa padma.

● DARI HALAMAN 1

Kemudian untuk mandyaning mandala diperuntukan rumah dinas yang di dalamnya ada ruang pertemuan, dan kamar tidur.

Selanjutnya, pada nistaning mandala untuk ruang tidur atau istirahat ajudan, supir, dan pembantu, kemudian ada garasi.

"Namun ada perbedaan antara rumah jabatan bupati dan wabup. Untuk bupati dilengkapi dengan ruangan

pertemuan yang bisa menampung hingga 100 orang. Sedangkan untuk wabup hanya satu ruang pertemuan saja," kata Surya.

Dia mengatakan, untuk anggaran yang digelontorkan adalah khusus untuk pembangunan Rumjab Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan untuk ruang pertemuan akan menggunakan anggaran terpisah. (made prasetia aryawan)

Edisi : Minggu, 14 Januari 2018

Hal : 7